

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Artikel Jurnal:

- Anggraeni, L & Ramdhani. (2018). Pencegahan *Money Politic* dalam Pemilihan Umum Melalui Penguatan Kebijakan Non Penal. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 4(1), hlm. 62
- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Asrori. (2014). Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), hlm. 101-116.
- Bungin, M.B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Darmawan, Cecep. (1999). Citra Birokrasi dan Upaya Pemberdayaannya. *Mimbar Pendidikan: No. 2/XV/III/1999*. hlm. 44
- Darmawan, Cecep. (2009). Pemilu dan Penguatan Demokrasi. *Jurnal Konstitusi*, 2(1), hlm. 54.
- Fadil, F. (2013). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal*, 11(2), hlm. 251-262.
- Hariyati, E. (2015). Peran Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Batu Balai Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), hlm. 1914-1927.
- Henryk, S. (2013). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Sungai Keledang Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), hlm. 612-625.
- Hermansyah. (2015). Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Tana Lia Kabupaten Tana Tidung (Studi Kasus di Desa Tanah Merah dan Desa Sambungan). *eJournal Pemerintahan Integratif*, 3(2), hlm. 351-362.
- Lutfia, A.R. (2013). Menilik Urgensi Desa di Era Otonomi Daerah. *Journal of Rural and Develoment*, 4(2), hlm. 135-143.
- Melis. dkk. (2016). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Studi di Desa Wawolesea Kecamatan Lasolo Kabupaten Konawe Utara). *Jurnal Ekonomi (JE)*, 1(1), hlm. 99-105.
- Moleong, L.J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Ngarsiningtyas, S.K. & Sembiring, W.M. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 4(2), hlm. 161-175.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pitano, A. & Kartiwi (2016). Penguatan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Menuju Pembangunan Berkelanjutan dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Politikologi*, 3(1), hlm. 27-37.
- Pono. dkk. (2017). Efektivitas Peran dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Upaya Pembangunan Desa. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), hlm. 145-158.
- Rokhayati, I. & Astuti, R.P. (2015). Pengukuran Kinerja Perangkat Desa di Kabupaten Banyumas dengan Spiritual Leadership. *Jurnal Probisnis*, 8 (2), hlm. 53-65.
- Shuida, I.N. (2016). *Buku Bantu Pengelolaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Sugiyono. (2009a). *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011b). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015c). *Metode Penelitian & Pengembangan*, Bandung: Alfabeta.
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read.
- Suwardianto, S. (2015). Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman. *Artikel Jurnal Skripsi Pendidikan Luar Sekolah*, hlm. 1-12.
- Ulina, S. (2014). Tugas dan Fungsi Kepala Desa Beserta Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kinerja pada Kantor Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 7(2), hlm.392-399.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Neneng Afiati Fakhriyyah, 2018

PERAN APARATUR DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMBANGUNAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Sumber Online dan Bentuk Lain:

Badan Pusat Statistik. (2014). Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi dan Topografi Wilayah, 2003–2014. [online]. Diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/907>

